

Menurut (Thomas, L. 1991) karakter berkaitan dengan konsep moral (*moral knowing*), sikap moral (*moral felling*), dan perilaku moral (*moral behavior*). Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan.

Pancasila pada pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut lagi dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan hal yang sangat penting, bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sebagai warga negara.

Pemilihan sekolah sebagai perintis pendidikan karakter diserahkan kepada dinas masing-masing. Sosialisasi ditujukan kepada seluruh warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan. Jadi, kunci keberhasilan pendidikan karakter itu ada di kepala sekolah. Kalau ada niat berubah menjadi yang lebih baik, maka seterusnya akan menularkan perilaku baik bagi guru-guru dan murid-muridnya. Prinsipnya, tentu dimulai dari diri sendiri, diawali dari yang mudah, dan dilakukan saat ini juga. Misalnya, datang tepat waktu. Hal terpenting adalah lingkungan sekolah, baik murid, guru, dan tenaga kependidikannya, menjadi lebih baik karena menerapkan pendidikan karakter. Hasil dari pendidikan karakter tidak dapat dirasakan atau dilihat seketika, karena hal ini memerlukan waktu lama. Penerapan pendidikan karakter memerlukan kerjasama berbagai pihak dan juga memerlukan contoh dari pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua.

Menurut (Tirtahardja, Umar, La Sulo, 2005) berpendapat bahwa seharusnya pendidikan

yang sehat mampu menunjukkan titik temu atau menjembatani antara teori dan praktek. (Abduhzen, M, 2010) berpendapat bahwa strategi pendidikan kita pada berbagai tingkatannya sangat kurang menghiraukan pengembangan nalar sebagai basis sikap dan perilaku. Pembelajaran di sekolah kita lebih cenderung pada mengisi atau mengindoktrinasi pikiran. Akibatnya, apa yang diperoleh di sekolah seperti tidak berkorelasi dengan kehidupan nyata. Pendidikan harus mampu menciptakan keseimbangan dalam kehidupan peserta didiknya, (Artadi, I Ketut, 2004).

Agar pendidikan karakter anti korupsi dapat mencapai sasaran, beberapa langkah dapat dilakukan pemerintah dan Kemendiknas, seperti pelatihan-pelatihan kepribadian kepada guru-guru untuk menanamkan sikap anti korupsi. Hasilnya nanti terlihat dalam sikap keseharian guru dalam menjalankan tugasnya. Sikap-sikap anti korupsi yang ditunjukkan oleh guru tentu akan lebih tajam pemikiran siswa mengenai korupsi dibandingkan dengan teori-teori hapalan mengenai tindak korupsi. Langkah lain yang dapat diambil untuk memaksimalkan tujuan pendidikan karakter anti korupsi adalah memberikan sanksi tegas kepada guru dan pegawai-pegawai dinas pendidikan yang melakukan tindakan korupsi. Sehingga dunia pendidikan terlepas dari tindakan korupsi yang akan berdampak pada penciptaan kondisi yang mendukung pelaksanaan pendidikan karakter anti korupsi.

Melihat berbagai kendala yang membentangi dalam pelaksanaan pendidikan karakter anti korupsi ini, maka sudah sepatutnyalah dilakukan perbaikan dalam tubuh institusi pendidikan terlebih dahulu. Agar jangan sampai rencana manis hanya berbuah tawar atau tiada berguna. Guru sebagai ujung tombak pendidikan karakter anti korupsi haruslah merefleksi diri. Penanaman sikap luhur ini akan tercapai apabila guru sanggup menjadi contoh sikap jujur, baik, bertanggung jawab, dan adil bagi siswanya. Bukan hanya pemberian teori mengenai ciri-ciri sikap jujur, baik, bertanggung